



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## RENJA TAHUN 2025

---

### DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

**PAINAN - 2024**



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangka Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

#### Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
  - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
  - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
  - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
  - c. Perubahan RKPD Tahun 2024; dan
  - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 5 Agustus 2024  
BUPATI PESISIR SELATAN,



KUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 6 Agustus 2024

Kepala Dinas,



**YANDES AMRIANAI, M.Pd. M.Si**

NIP. 19660103 199412 1 002

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	I.1 Latar Belakang .....	1
	I.2 Landasan Hukum.....	3
	I.3 Maksud dan Tujuan .....	5
	I.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN 2023 .....</b>	<b>8</b>
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .....	8
	2.2. Analisis kinerja Pelayanan Perangkat daerah .....	23
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	25
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	40
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>42</b>
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	42
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	43
	3.3. Program dan Kegiatan .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL T.C.29 .....	9
TABEL T.C.30 .....	24
TABEL T.C.31 .....	26
TABEL T.C.32 .....	40
TABEL T.C.33 .....	48

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perbahana rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Renstra yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, penyusunan RKPD untuk tahun 2025 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk memwadahi hasil penjangkauan aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Musrenbang serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

## **2. Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagai mana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan

pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan uraian tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : EVALUASI RENJA DAERAH TAHUN 2024**

Berisikan uraian tentang isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

**BAB IV : RENCANA KERJA TAHUN 2025**

Berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju tahun 2025 berdasarkan pagu indikatif, sumber dana/pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan.

**BAB V: PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN 2023

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Koperasi, UKM dan Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada table T-C. 29 berikut ini :

TABEL T-C. 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN s/d DENGAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)/2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Perangkat Daerah n-1)/2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	realisasi renja perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)/2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									



							<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen publik dan dipublish										
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket		12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%		
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket		12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%		
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket		12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%		
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%		
							Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%		
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%		

						Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia											
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit			-	-	-	2 unit	2 unit			100%
						<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja											
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan				100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan				100%
						<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik											

						<b>Pemerintahan Daerah</b>									
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit		7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
						Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit		2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan damesin lainnya dipelihara	63 unit		-	-	-	-	-	-
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM</b>									
						<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN</b>	<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>								





						Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota									
						<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>									
						<b>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/</b>	Persentase Koperasi Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian									
						Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/ pengelola koperasi/ UMK yang mengikuti BIMTEK/ Diklat	150 koperasi/ UMK		150 koperasi /UMK	150 koperasi/ UMK	100%	150 koperasi/UM K	150 koperasi/U MK		100%







						Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasarkerja melalui system online (karir hub)	2500 orang		2500 orang	1922 orang	76,88%	2500 orang	1344 orang	53,76%
						<b>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terfasilitasinya perlindungan dan kompetensi CPMI/PMI								
						Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terfasilitasinya perlindungan dan kompetensi CPMI/PMI								
						<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perselisihan Industrial Yang Diselesaikan</b>								
						<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok</b>	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan								

						<b>Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>								
						Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan	116 perusahaan			-	-	-	-
						<b>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan							
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala	-	-	50 perusahaan	50 perusahaan	100%	-	-



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dinas yang menyelenggarakan Layanan Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Layanan Urusan Pilihan yaitu Urusan Tenaga Kerja.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada tabel T-C.30. dibawah ini :

**TABEL T-C. 30**  
**PENCAPAIN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	INDIKATOR	SPM/ Stand ar Nasion al	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai RB Perangkat Daerah			B (65)							
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		A	A	A (85)	A (85)	A (84,63)		A (84,63)	A	
3	Nilai Kematangan Inovasi PD			100	100		45		45	100	
4	Persentase Koperasi Berkualitas		18%	20%	35%	15,64%	33,97%		33,97%	36%	
5	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil		72%	75%	78%	72%	74,95%		74,95%	80%	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka		6,85%	4,50%	4,6%	4,61%	4,75%		4,75%	4,5	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Maraknya masyarakat yang meminjam uang untuk tambahan modal kepada perusahaan pinjaman dana ilegal, baik secara online maupun offline.
2. Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui koperasi.
3. Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat daerah yang bersangkutan review rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C. 31. sebagai berikut:

TABEL T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	12 bulan	4.491.794.343	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	12 bulan	27.553.600	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan			

Rencana Kerja (RENJA) | 2025

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	25 dokumen	27.553.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	12 bulan	<b>3.750.323.858</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33 orang/bulan	3.626.794.334	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12dokumen	123.529.524	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia</b>		<b>100.000.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia</b>			

	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah rencana kebutuhan barang milk daerah SKPD	12 unit	100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah rencana kebutuhan barang milk daerah SKPD			
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase dokumen publik dan dipublish	12 bulan	<b>213.323.027</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase dokumen publik dan dipublish			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	7.273.800	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	33.746.421	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	21.600.306	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			

Rencana Kerja (RENJA) | 2025

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12dokumen	3.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	14.822.500	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	132.280.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia		<b>119.820.514</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia			

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	119.820.514	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja		<b>202.689.335</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	53.280.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	149.409.335	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan			
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>		<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>		<b>178.084.100</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>			

Urusan Pemerintahan Daerah											
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	117.140.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				
Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Mesin yang di perlihora	63 unit	12.800.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Mesin yang di perlihora				
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	48.144.100	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM</b>						

4	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>		<b>38.360.000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>			
	<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatannya</b>		<b>38.360.000</b>	<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatannya</b>			
	Sub Kegiatan Melaksanakan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	50 koperasi	38.360.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota			

2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>		<b>138.640.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>			
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		<b>138.640.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	20 unit usaha	138.640.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha			

3	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>		619.615.000	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>			
	<b>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Koperasi Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		619.615.000	<b>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Koperasi Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian, UKM dan Kewirausahaan	150 koperasi/UMKM	619.615.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian, UKM dan Kewirausahaan			
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>				207.000.160	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>					

	<b>Kegiatan Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dngan para pemangku kepentingan</b>		Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil		207.000.160	<b>Kegiatan Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dngan para pemangku kepentingan</b>		Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	1000 UMK	207.000.160	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan			
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya</b>		<b>15.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya</b>			

	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>		Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil		15.000.000	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>		Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil			
	Sub Kegiatan Produksi Pengilahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pesir Selatan	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM serta desain dan teknologi	37 UMKM	15.000.000	Sub Kegiatan Produksi Pengilahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pesir Selatan	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM serta desain dan teknologi			
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				546.999.740	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					
6	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten</b>		262.499.840	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten</b>			
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis		227.499.840	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis			

			Kompetensi pada Tahun n					Kompetensi pada Tahun n			
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 orang	227.499.840	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		<b>35.000.000</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina			
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 LPKS	35.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			
7	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan</b>	<b>2500 orang</b>	<b>47.000.000</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan</b>			

	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	<b>2500 orang</b>	<b>47.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)			
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 orang	47.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			
7	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase Perselisihan Industrial Yang Diselesaikan</b>	-	<b>237.499.900</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase Perselisihan Industrial Yang Diselesaikan</b>			
	<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	<b>0</b>	<b>237.499.900</b>	<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan			
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan	Kab. Pesisir	Jumlah perkara perselisihan yang	116 perusahaan	237.499.900	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,	Kab. Pesisir	Jumlah perkara perselisihan yang			

Rencana Kerja (RENJA) | 2025

	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Selatan	terselesaikan			dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Selatan	terselesaikan			
<b>TOTAL</b>					<b>6.057.409.334</b>					<b>6.057.409.334</b>	

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khusus untuk Bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL T-C.3.2.**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kompetensi Klaster	Pasar Tapan Kec. BAB Tapan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60.000.000	
		Kecamatan Ranah Pesisir		200.000.000	
		Punggasan Utara		500.000.000	
		Punggasan Utara		200.000.000	
<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>				
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan				

	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Nagari Lalang Panjang Indera Pura Kec. BAB Tapan	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	100.000.000	
		10 Nagari Kecamatan pancung Soal		500.000.000	
		Ampang Tulak Kec. BAB Tapan		200.000.000	
		Batang Arah Kec. BAB Tapan		250.000.000	
		Dusun Baru Kec. BAB Tapan		300.000.000	
		Barung-Barung Belantai Selatan Kec. Koto XI Tarusan		200.000.000	
		Limau Gadang Lumbo Kec. IV Jurai		250.000.000	
		Lumpo Kec. IV Jurai		500.000.000	
		Limau Gadang Lumbo Kec. IV Jurai		250.000.000.	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran visi, misi Bupati. Dalam perkembangan dalam satu tahun berjalan dimungkinkan adanya perkembangan lain berkaitan dengan ketersediaan dana, target kinerja, sasaran dan lain-lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi dengan berbagai program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, artinya bahwa berbagai program yang dirancang diharapkan agar tidak tumpang tindih namun saling mendukung.

Kebijakan Pembangunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Koperasi, UKM, Kementerian Ketenagakerjaan yang memuat sebagai berikut:

- a. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2020 – 2025 adalah sebagai berikut:
  1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju, Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM.

2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global .
3. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dalam periode 2020-2025. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Misalnya keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan terformulasinya tujuan, maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. Selain itu perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan

strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program/kegiatan.

Adapun korelasi antara misi dan tujuan jangka menengah atau untuk lima tahun ke depan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

#### Misi dan Tujuan

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>
Misi 1: Merkuat Tata Kelola Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
Misi 3 :Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan

### **3.2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja yang Menggambarkan Pencapaian Renstra**

Adapun sasaran jangka menengah atau untuk lima tahun kedepan dari tujuan yang telah ditentukan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat berikut ini :

#### Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD
3. Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas
4. Meningkatnya daya saing sektor	Persentase usaha mikro menjadi

unggulan	wirausaha
5. Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah.

Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dengan para stakeholders pada acara Forum OPD, disepakati sebanyak 9 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Adapun rincian rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebagai berikut :

#### a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**
  1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
  2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3. Program Penempatan Tenaga**
  1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
  2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
  3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Hubungan Industrial**
  1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**
  1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 6. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**
  1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
8. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**
  1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
9. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**
  1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Masing-masing Program dan Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel T-C.33 berikut ini :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Pesisir Selatan

Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA						5.586.292.203,00					0,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.586.292.203,00					0,00			
2	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						307.254.533,00					0,00			
2	0	0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						40.000.058,00				0,00			
2	0	0	2.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						40.000.058,00				0,00		
2	0	0	2.	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro											
					Dokumen rencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten pesisir selatan	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	40.000.058,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2 Dokumen	0,00

## Rencana Kerja (RENJA) | 2025

2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						788.254.819,00						0,00
2	0	0	2.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						750.000.000,00						0,00
2	0	0	2.	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi												
					Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.5 %	96 Orang	10 Paket	750.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96 Orang	0,00	
2	0	0	2.		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						38.254.819,00						0,00
2	0	0	2.	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												
					Jumlah LPKS yang dilatih	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah LPKS yang dibina	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 LPKS	26 Lembaga	10 LPKS	38.254.819,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	26 Lembaga	0,00	
2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						73.999.826,00						0,00
2	0	0	2.		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						73.999.826,00						0,00
2	0	0	2.	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online												

Rencana Kerja (RENJA) | 2025

					Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Tersedianya informasi pasar kerja bagi pencari kerja	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190 orang	2500 Orang	2500 orang	73.999.826,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	0,00		
2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							54.999.830,00						0,00	
2	0	0	2.		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0,00							0,00
2	0	0	2.	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
					-	0	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	00	-	0,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		0	00	0,00		
					-	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Perusahaan	-	0,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perus	15 Perusahaan	0,00		





## Rencana Kerja (RENJA) | 2025

2	1	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000,00					0,00	
2	1	0	2.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	5 Dokumen	5 dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0,00
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.180.775.390,00					0,00	
2	1	0	2.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	33 Orang/bulan	-	3,776,767,202,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	0,00
2	1	0	2.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	104.008.188,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	0,00







## Rencana Kerja (RENJA) | 2025

					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	-	69.757.240,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							204.344.590,00					0,00
2	1	0	2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined undefined	12 Laporan	100 %	34.680.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	
2	1	0	2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined undefined	12 Laporan	100 %	169.664.590,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	0,00	











*Rencana Kerja (RENJA) | 2025*

	7	8																				
2	1	0	2.		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											0,00					0,00	
2	1	0	2.	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi																	
					Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah bantuan sarana UMKM	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	15 UMKM	20 Unit Usaha	37 UMK M	300,000,000,00	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Jumla h Unit Usaha Mikro yang Terfas ilitasi dalam Penge mban gan Produ ksi dan Pengo lahan, Pemas aran, SDM, serta Desai n dan Tekno logi	20 Unit Usaha				0,00		
<b>TOTAL</b>											<b>6.900.483,00</b>							<b>0,00</b>				

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra serta Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 terdapat 9 Program dan 18 Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan telah tersusunnya Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia, perekonomian masyarakat. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karena itu segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan. Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Koperasi, UKM dan tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan SDM, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Tahun 2025.
4. Renja ini merupakan sarana pendukung pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam Renja telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan

kendala di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah antara lain :

1. Pendelegasian beberapa wewenang kepada Unit Kerja Layanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan masih terkendala kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.
2. *Law enforcement*/sanksi hukum yang lemah.

Walaupun demikian dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tetap bertekad akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diembankan.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.

Painan, 6 Agustus 2024  
Bupati Pesisir Selatan,



**RUSMA YUL ANWAR**